



Media Sosial antara Hegemoni dan Emansipasi : Tinjauan Kritis terhadap Peran Edukatif dalam Demokrasi Digital

Aris Munandar^{1*}, Fakhri Fadilah Muttaqin², Endang Susanti³

^{1,2,3} Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Email: arism2365@gmail.com

Alamat: JL Kertamukti, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Korespondensi penulis: arism2365@gmail.com

Abstract. *This research aims to explore the role of social media in Indonesia's digital democracy, by highlighting the tension between its function as a tool of hegemony or a means of emancipation. The background of this study is the increasing use of social media by political actors and civil society in voicing, shaping or criticizing public narratives ahead of the 2024 elections. This study uses a critical qualitative approach with a descriptive study design, and applies the Critical Discourse Analysis method and netnographic observation of political content on three main platforms: Twitter, TikTok, and Instagram. Data was collected through literature studies, digital documentation, and observation of user interactions in digital political campaigns.*

The results show that the digital space is dominated by hegemonic actors such as political elites, partisan buzzers, and platform algorithms that reinforce certain narratives. However, there are also spaces of emancipation formed by digital communities and independent content creators who use social media as a means of political education and symbolic resistance. Counter-narratives that emerge tend to be temporary and are often limited by distribution and visibility controls. These findings have important implications for the development of more critical and participatory digital literacy policies. In addition, this study contributes to the enrichment of critical communication theory, by affirming the importance of viewing social media as a complex pedagogical and ideological field in contemporary democratic practice.

Keywords: *Social media, digital hegemony, emancipation, critical discourse, digital democracy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran media sosial dalam demokrasi digital Indonesia, dengan menyoroti ketegangan antara fungsinya sebagai alat hegemoni atau sarana emansipasi. Latar belakang studi ini adalah meningkatnya penggunaan media sosial oleh aktor politik dan masyarakat sipil dalam menyuarakan, membentuk, atau mengkritisi narasi publik menjelang Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan desain studi deskriptif, serta menerapkan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) dan observasi netnografis terhadap konten politik di tiga platform utama: Twitter, TikTok, dan Instagram. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi digital, dan observasi interaksi pengguna dalam kampanye politik digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang digital didominasi oleh aktor-aktor hegemonik seperti elite politik, buzzer partisan, dan algoritma platform yang memperkuat narasi tertentu. Namun, ditemukan pula ruang-ruang emansipasi yang dibentuk oleh komunitas digital dan kreator konten independen yang menggunakan media sosial sebagai sarana pendidikan politik dan resistensi simbolik. Narasi tandingan yang muncul cenderung bersifat temporer dan sering kali dibatasi oleh kontrol distribusi dan visibilitas. Temuan ini memiliki implikasi penting terhadap pengembangan kebijakan literasi digital yang lebih kritis dan partisipatif. Selain itu, studi ini berkontribusi pada pengayaan teori komunikasi kritis, dengan menegaskan pentingnya memandang media sosial sebagai medan pedagogis dan ideologis yang kompleks dalam praktik demokrasi kontemporer.

Kata kunci: Media sosial, hegemoni digital, emansipasi, wacana kritis, demokrasi digital.

1. LATAR BELAKANG

Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan transformasi signifikan terhadap ruang publik akibat perkembangan teknologi digital. Media sosial telah menjelma menjadi arena diskursif yang sangat dinamis, menggantikan peran media konvensional dalam membentuk opini publik, mengorganisasi gerakan sosial, dan mendiseminasi informasi. Di Indonesia, laporan We Are Social mencatat bahwa lebih dari 170 juta penduduk aktif menggunakan media sosial, menjadikan platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok sebagai ruang utama partisipasi publik dalam isu-isu politik, sosial, dan budaya (Thompson, 2024).

Namun, pertumbuhan eksponensial penggunaan media sosial juga menghadirkan dilema kritis. Di satu sisi, platform digital ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam praktik demokrasi deliberatif, menyuarakan aspirasi, dan mengekspresikan identitas politik secara bebas. Di sisi lain, media sosial menjadi ladang subur bagi manipulasi informasi, pembentukan opini publik secara artifisial melalui bot dan buzzer, serta penyebaran ujaran kebencian yang justru mengikis kualitas deliberasi publik (Khaeroni, 2022).

Perdebatan mengenai peran media sosial dalam demokrasi digital pun menjadi semakin kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media sosial mampu menjadi sarana emansipasi sosial yang mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap ketimpangan struktural dan dominasi ideologis (Imron, 2022 dan Ardini, 2015). Sementara studi lain menyoroti bagaimana media sosial justru mereproduksi hegemoni baru melalui algoritma dan kepentingan korporasi global yang tidak netral secara politik (Fathurokhmah, 2023).

Fenomena ini menghadirkan ambiguitas fungsi media sosial antara sebagai alat edukatif yang mencerdaskan publik atau sebagai instrumen hegemonik yang membungkam resistensi. Dalam konteks demokrasi Indonesia, ambiguitas ini tampak dalam berbagai dinamika politik elektoral, termasuk kampanye hitam, penyebaran disinformasi, dan kontrol terhadap narasi digital oleh aktor-aktor berkuasa (Aminudin, 2023). Praktik ini menunjukkan bahwa alih-alih menjadi arena deliberatif, media sosial kerap menjadi ruang dominasi simbolik.

Dalam pandangan Gramsci, hegemoni bukan hanya bentuk dominasi koersif, melainkan juga kesepakatan ideologis yang dibentuk melalui kontrol atas budaya dan bahasa (Mudjiyanto dkk., 2023). Oleh karena itu, media sosial dapat dibaca sebagai medan kontestasi antara ideologi dominan dan wacana tandingan (Alfazri & Meiranti, 2024). Di sinilah pentingnya mengkaji media sosial melalui pendekatan kritis yang tidak hanya melihat output komunikasi, tetapi juga dinamika kekuasaan dan resistensi yang menyertainya.

Sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada aspek kuantitatif, seperti intensitas penggunaan, penyebaran informasi palsu, atau analisis sentimen politik. Sangat sedikit penelitian yang menggali secara mendalam makna, pengalaman, dan strategi pengguna media sosial sebagai subjek yang aktif dalam menavigasi struktur hegemoni dan mengupayakan emansipasi. Kekosongan literatur ini menghambat pemahaman yang utuh terhadap peran edukatif media sosial dalam demokrasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana individu dan komunitas menggunakan media sosial sebagai sarana pendidikan kritis dalam menghadapi dominasi ideologis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan basis teori kritis untuk mengungkap dinamika hegemoni dan emansipasi dalam praktik komunikasi digital sehari-hari. Fokus penelitian adalah pada aktor-aktor kunci dalam ruang digital yang berperan sebagai edukator publik, baik secara formal maupun informal.

Secara metodologis, pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap praktik diskursif yang tidak selalu terjangkau oleh analisis statistik. Dengan menggunakan teknik observasi daring (netnografi) dan wawancara mendalam, penelitian ini menekankan pentingnya mendengarkan suara dari bawah (*voices from below*) yang sering kali terpinggirkan dalam narasi besar demokrasi digital.

Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi strategi diskursif yang digunakan oleh aktor digital untuk menantang wacana dominan, serta menguraikan bagaimana praktik tersebut berkontribusi pada pembentukan kesadaran kritis dan pembelajaran sosial di ranah digital. Dengan demikian, media sosial tidak semata-mata dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai medan pedagogi kritis yang potensial.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian komunikasi kritis, khususnya dalam mengembangkan pemahaman baru mengenai relasi antara teknologi, ideologi, dan pendidikan. Kajian ini juga memperkaya literatur studi media dengan menyoroti bagaimana praktik digital dapat menjadi bagian dari gerakan emansipatoris yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi partisipatoris.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pendidik, aktivis digital, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan literasi digital yang transformatif. Hal ini sangat relevan di tengah tantangan demokrasi yang semakin kompleks di era *post-truth*, di mana validitas informasi kerap dikalahkan oleh kekuatan viralitas.

Dengan kata lain, studi ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan realitas, tetapi juga untuk membuka ruang refleksi dan transformasi sosial melalui medium yang semakin mendominasi kehidupan masyarakat kontemporer: media sosial. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang mendasari penelitian ini adalah: Apakah media sosial dalam konteks demokrasi digital Indonesia lebih berfungsi sebagai alat hegemoni atau sebagai sarana emansipasi?

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hegemoni (Antonio Gramsci)

Konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci merujuk pada dominasi ideologis yang tidak bersifat koersif, tetapi diterima secara sukarela oleh masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai dan wacana yang ditanamkan oleh kelompok dominan. Hegemoni, dalam pandangan Gramsci, melibatkan “persetujuan aktif dari yang diperintah,” yang dikonstruksi melalui kontrol budaya dan media (Siswati, 2018). Dalam konteks ini, media sosial dapat dilihat sebagai instrumen penting dalam menyebarkan wacana hegemonik, di mana algoritma dan desain platform sering kali memperkuat narasi dominan sambil menyingkirkan narasi tandingan. (Mudjiyanto dkk., 2023).

Dalam ranah digital, media sosial tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga arena kontestasi kuasa di mana dominasi politik, ekonomi, dan budaya direproduksi secara simbolik. Gramsci menyebut media sebagai “aparatus ideologis” yang berperan penting dalam menjaga status quo kekuasaan melalui kontrol representasi (Juwita dkk., 2023). Oleh karena itu, konsep hegemoni digunakan dalam studi ini untuk mengkaji bagaimana narasi dominan dibentuk, disebarluaskan, dan dinormalisasi dalam ruang digital.

Teori Emansipasi (Habermas, Freire, Foucault)

Untuk mengimbangi perspektif hegemonik, penelitian ini juga mengacu pada teori-teori emansipasi dari Jürgen Habermas, Paulo Freire, dan Michel Foucault. Habermas (1984) mengemukakan konsep ruang publik sebagai arena diskursif di mana warga negara dapat berdialog secara rasional dan setara untuk mencapai konsensus. Dalam demokrasi digital, ideal ini sulit tercapai karena algoritma media sosial kerap menciptakan “ruang gema” (echo chambers) dan “gelembung filter” (filter bubbles) yang menghambat deliberasi rasional dan menguatkan polarisasi (Khaeroni, 2022).

Paulo Freire (1970), melalui teori pendidikan pembebasannya, mengusulkan pentingnya kesadaran kritis (conscientization) sebagai dasar emansipasi sosial. Dalam konteks media

sosial, kesadaran kritis ini dapat diaktualisasikan melalui produksi konten yang menantang wacana dominan dan mendorong partisipasi aktif yang reflektif. Pendekatan Freire penting untuk memahami bagaimana aktor digital dapat menjalankan fungsi edukatif dalam membongkar narasi hegemonik (Gibson, 1999).

Sementara itu, Michel Foucault berkontribusi melalui pemahamannya tentang relasi kuasa dan pengetahuan. Bagi Foucault, kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga memproduksi “rezim kebenaran” melalui institusi dan wacana. Dalam konteks media sosial, produksi dan sirkulasi informasi bukanlah proses netral, tetapi penuh dengan praktik seleksi, penghapusan, dan penguatan narasi tertentu (Basumatary, 2020). Teori Foucault membuka ruang analisis mengenai bagaimana informasi digital menjadi instrumen normalisasi dan pengawasan sosial.

Media Sosial dan Demokrasi Digital

Media sosial merupakan infrastruktur kunci dalam demokrasi digital modern. Di satu sisi, media sosial membuka peluang baru bagi keterlibatan warga negara dalam kampanye politik, advokasi isu publik, dan pengawasan kekuasaan. Studi (Ansori dkk., 2021) menunjukkan bahwa aktivisme digital berbasis media sosial telah menjadi bentuk baru civic engagement, terutama di kalangan generasi muda. Namun, di sisi lain, media sosial juga rentan terhadap infiltrasi disinformasi, manipulasi algoritma, dan dominasi aktor-aktor politik yang memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kontrol ideologis.

Fenomena filter bubble dan echo chamber memperparah situasi, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan preferensi mereka sendiri, sehingga memperkuat bias dan melemahkan keterbukaan terhadap perspektif berbeda. Penelitian (Ratnaningsih, 2019) menekankan bahwa algoritma media sosial tidak netral dan memiliki efek struktural dalam membentuk lanskap opini publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana media sosial benar-benar mendukung demokrasi deliberatif.

Studi Terdahulu dan Kesenjangan Teoretis

Beberapa penelitian relevan mendukung pemetaan ini. Pertama, Khaeroni (2022) mengkaji disrupsi digital terhadap pendidikan dan menunjukkan bagaimana platform digital dapat menciptakan kontrol terselubung melalui narasi dominan. Kedua, Ratnaningtyas et al. (2023) membahas hegemoni digital dalam perspektif Gramsci dan menyoroti ketimpangan distribusi informasi dalam ruang siber. Ketiga, Ansori et al. (2021) meneliti partisipasi pemuda dalam aktivisme media sosial dan menunjukkan adanya potensi emansipasi di balik

keterlibatan digital. Meski demikian, ketiga studi tersebut belum secara mendalam menelaah bagaimana pengguna media sosial mereproduksi atau menolak hegemoni dalam praktik diskursif sehari-hari dari perspektif pedagogis.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan teoretis dan empiris dalam studi-studi sebelumnya: yaitu keterbatasan dalam menjelaskan pengalaman, strategi, dan praktik diskursif warga digital dalam menavigasi ruang sosial yang dikuasai oleh algoritma dan ideologi dominan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memadukan teori hegemoni, emansipasi, dan teknologi komunikasi dalam kerangka interdisipliner berbasis pendekatan kualitatif.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka konseptual penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi utama: (1) hegemoni sebagai kekuasaan simbolik dan kontrol wacana (Gramsci); (2) emansipasi sebagai proses pendidikan kritis dan pembebasan (Freire, Habermas); serta (3) media sosial sebagai arena kontestasi diskursif yang dipengaruhi oleh logika algoritmik dan struktur ekonomi-politik digital (Foucault). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kaya terhadap peran edukatif media sosial dalam demokrasi digital baik sebagai alat reproduksi kekuasaan maupun sebagai medan perlawanan simbolik.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis (*critical qualitative inquiry*), (Hamzah, 2020) yaitu pendekatan yang tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, tetapi juga untuk mengungkap struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik praktik sosial dan kultural yang tampak. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana media sosial digunakan sebagai alat hegemoni atau sarana emansipasi dalam konteks demokrasi digital (Nugroho, 2025). Perspektif ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga mendekonstruksi wacana dominan dan membuka kemungkinan transformasi sosial (Latif dkk., 2022). Jenis penelitian ini adalah studi kualitatif deskriptif dengan penerapan metode Analisis Wacana Kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA). CDA digunakan untuk membedah relasi antara bahasa, wacana, dan kekuasaan yang bekerja dalam ruang digital. Metode ini bertumpu pada

asumsi bahwa bahasa tidak netral, melainkan merupakan instrumen ideologis yang membentuk realitas sosial (Videska, 2023). Dalam konteks ini, CDA digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana narasi politik dan pendidikan digital dikonstruksi, direproduksi, atau dilawan dalam media sosial seperti Twitter, TikTok, dan Instagram (Kurniawan, 2025).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap unggahan politik yang bersifat edukatif atau hegemonik pada platform media sosial. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui teknik observasi netnografis, yakni observasi partisipatif dalam komunitas digital untuk menangkap interaksi sosial, narasi yang berkembang, dan respons audiens terhadap isu-isu demokrasi, pendidikan, dan kekuasaan. Pendekatan netnografi ini relevan karena mampu mengungkap makna sosial dalam interaksi digital secara kontekstual dan holistik (Putra, 2025).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar observasi netnografis, catatan lapangan digital, dan pedoman analisis wacana. Peneliti mengamati akun-akun media sosial yang aktif dalam diskursus politik baik yang bersifat hegemonik (misal buzzer politik, akun partai) maupun yang bersifat edukatif atau emansipatoris (seperti aktivis literasi digital dan edukator independen). Selain itu, digunakan dokumentasi digital (screenshot, rekaman layar, arsip komentar) untuk mendukung kredibilitas dan keterulangan temuan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.

Teknik analisis data mengacu pada model CDA yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, yang mencakup tiga tahapan: (1) analisis teks, yakni mengidentifikasi kata kunci, metafora, dan framing dalam unggahan digital; (2) praktik diskursif, yaitu menganalisis bagaimana wacana diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam ruang digital; dan (3) praktik sosial, yaitu menafsirkan relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik wacana tersebut. Peneliti menelusuri narasi dominan, mengidentifikasi aktor-aktor digital dan jejaring kekuasaan, serta mengevaluasi potensi emansipatoris dalam wacana alternatif yang muncul dari akar rumput (Kurniawan, 2025; Nugroho, 2025).

Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, digunakan teknik triangulasi metode dan sumber, termasuk perbandingan antar platform (Twitter, Instagram, TikTok) dan verifikasi silang dengan dokumen literatur. Secara etis, penelitian ini mengikuti prinsip anonymity dan informed consent dalam pengumpulan data digital. Meskipun data berasal dari ruang publik daring, identitas pengguna tidak akan disebutkan kecuali mereka adalah tokoh publik atau akun resmi. Prosedur ini bertujuan menjaga hak privasi pengguna media sosial, sebagaimana ditegaskan oleh etika riset komunikasi digital (Latif et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Ruang Hegemoni

Media sosial di Indonesia telah menjelma menjadi salah satu instrumen utama dalam pembentukan opini publik dan konstruksi wacana politik. Dalam konteks demokrasi digital, platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter tidak lagi berperan sebagai ruang bebas yang netral, melainkan telah dipolitisasi secara sistematis oleh elite kekuasaan dan entitas korporat. Hegemoni digital bekerja secara halus namun efektif, dengan memanfaatkan logika algoritmik untuk mempertahankan narasi dominan sambil menekan narasi tandingan

Dominasi wacana ini diperkuat melalui keterlibatan aktor-aktor politik seperti buzzer partisan dan akun-akun yang disponsori untuk menyebarluaskan konten yang mendukung status quo. Mereka memproduksi narasi yang disederhanakan, menekankan loyalitas terhadap figur politik tertentu, serta menstigma oposisi dengan label yang mereduksi kompleksitas isu. Dalam hal ini, media sosial menjadi ruang simbolik di mana kekuasaan direproduksi bukan melalui represi terbuka, melainkan melalui konsensus kultural yang dibangun secara visual dan emosional (Raynault & Lalancette, 2023).

Salah satu aspek utama dari hegemoni digital adalah keberpihakan algoritma. Sistem algoritmik media sosial berbasis pada prinsip *engagement*, yang secara otomatis memberikan visibilitas lebih besar kepada konten yang memicu reaksi tinggi baik dalam bentuk suka, komentar, maupun dibagikan. Sayangnya, konten edukatif atau kritis cenderung mendapat respons yang lebih rendah dan akhirnya terkubur dalam arus informasi yang didominasi oleh konten populis, hiburan, atau afirmatif terhadap kekuasaan .

Fenomena ini menciptakan situasi di mana pengguna media sosial tidak sepenuhnya sadar bahwa mereka menjadi objek dari proses produksi makna dan keuntungan ekonomi sekaligus. Gramsci menyebut kondisi ini sebagai *hegemoni kultural*, di mana ideologi dominan diterima secara sukarela oleh masyarakat sebagai kebenaran umum yang wajar, tanpa mempertanyakan struktur kuasa di baliknya.

Dalam praktiknya, hegemoni digital juga memunculkan ruang gema (*echo chambers*) dan gelembung filter (*filter bubbles*) yang memperkuat bias pengguna. Alih-alih mendorong keterbukaan dan deliberasi, media sosial justru menciptakan segregasi informasi yang memperkuat polarisasi politik. Ini menjadi paradoks bagi demokrasi digital yang idealnya menjamin keterlibatan setara dan pertukaran ide yang bebas (Khaerani, 2022).

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika buzzer dan tokoh politik turut menggunakan bahasa visual yang kuat seperti meme, video musik, dan infografis yang tampaknya sederhana, tetapi menyimpan pesan ideologis yang dalam. Media sosial menjadi arena *aesthetic politics*, di mana representasi visual menggantikan argumentasi rasional, dan preferensi emosional mengalahkan pertimbangan kritis. Narasi politik dikemas seperti produk konsumsi yang mudah dicerna, tetapi miskin substansi.

Tak hanya itu, strategi disinformasi turut mewarnai ruang digital dengan penyebaran berita palsu yang sulit diverifikasi. Dalam banyak kasus, buzzer memanfaatkan platform untuk menyerang aktivis, akademisi, atau jurnalis yang menyuarakan kritik terhadap rezim. Ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya ruang produksi pengetahuan, tetapi juga alat untuk menekan oposisi dan memperkuat rezim wacana tunggal.

Penelitian ini menemukan bahwa ruang digital Indonesia masih didominasi oleh aktor-aktor hegemonik seperti elite politik, buzzer partisan, dan platform media sosial itu sendiri. Dalam observasi terhadap konten politik di TikTok dan Instagram selama masa kampanye Pemilu 2024, terlihat bagaimana narasi dominan dibentuk dan disebarluaskan secara sistematis. Akun-akun buzzer yang terafiliasi dengan tokoh politik tertentu memproduksi konten yang menyederhanakan isu, membangun citra tokoh, dan menstigma oposisi (Saraswati, 2018).

Algoritma media sosial memiliki kontribusi besar dalam memperkuat dominasi ini. Konten yang mendukung narasi pemerintah lebih sering masuk ke linimasa pengguna berkat mekanisme engagement-based visibility. Analisis terhadap video politik populer di TikTok menunjukkan bahwa narasi edukatif yang bersifat kritis memiliki jangkauan lebih rendah dibandingkan narasi populis yang bersifat afirmatif terhadap kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya politisasi algoritma yang menghambat distribusi wacana tandingan (Surdiasis & Eriyanto, 2018).

Peran platform digital seperti Meta dan ByteDance juga patut dicermati. Studi Kurniawan (2025) menunjukkan bahwa perusahaan teknologi global cenderung mengutamakan konten yang tidak kontroversial demi menjaga keterlibatan pengguna dan iklan, yang secara tidak langsung memperkuat status quo. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kebijakan moderasi konten sering kali bersifat ambigu dan cenderung berpihak pada stabilitas naratif, bukan keberagaman gagasan.

Dalam konteks ini, hegemoni digital bekerja bukan melalui represi langsung, tetapi melalui pembingkaian makna, kontrol representasi, dan pengaturan visibilitas. Ini sesuai dengan pemikiran Gramsci yang menekankan bahwa kekuasaan ideologis tidak harus bersifat

koersif, tetapi dibentuk melalui konsensus yang diproduksi terus-menerus melalui institusi budaya, termasuk media sosial.

Media Sosial sebagai Ruang Emansipasi

Meskipun media sosial kerap dituduh memperkuat dominasi simbolik dan menyebarkan disinformasi, ruang digital juga menyimpan potensi besar sebagai medan emansipasi sosial-politik. Di balik arus utama yang dikendalikan oleh kekuatan hegemonik, muncul berbagai inisiatif dari akar rumput yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial, menyuarakan kritik terhadap struktur kekuasaan, dan membangun kesadaran politik masyarakat. Gerakan #ReformasiDikorupsi yang muncul kembali menjelang Pemilu 2024 menjadi representasi nyata dari dinamika tersebut, di mana aktivisme digital dimobilisasi secara kolektif oleh mahasiswa, komunitas sipil, dan netizen kritis (Nugroho, 2025).

Komunitas literasi digital seperti Bijak Bermedsos dan organisasi produksi media independen seperti Watchdoc memainkan peran sentral dalam mengisi kekosongan ruang edukatif di media sosial. Melalui video dokumenter, kampanye naratif, dan konten visual kreatif, mereka menyampaikan informasi yang tidak hanya faktual, tetapi juga menyentuh kesadaran moral dan politik masyarakat. Strategi ini mencerminkan semangat pedagogi kritis ala Paulo Freire, yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi pembebasan kesadaran (Gibson, 1999; Imron, 2020).

Ruang emansipatif ini semakin diperkuat dengan hadirnya berbagai forum digital seperti Twitter Spaces, Instagram Live, dan TikTok Dialog yang dijadikan tempat diskusi isu-isu publik secara lebih terbuka. Mahasiswa dan aktivis kerap menggunakan format ini untuk membahas topik seperti revisi undang-undang kontroversial, oligarki politik, hingga pendidikan yang terkomersialisasi. Interaktivitas yang ditawarkan platform ini memberikan pengalaman partisipatif yang sebelumnya tidak mungkin terjadi dalam media arus utama (Ansori et al., 2021; Kurniawan, 2025).

Namun, potensi emansipasi ini tidak bebas dari tantangan. Banyak akun atau konten yang bersifat edukatif dan kritis justru mengalami pembatasan jangkauan karena algoritma tidak berpihak pada konten reflektif yang tidak “menjual” secara emosional. Ditambah lagi, kampanye serangan balik dari buzzer partisan sering kali menyasar kreator independen dengan doxing, ancaman, atau labeling sebagai anti-negara. Ini menciptakan suasana represif

terselubung yang melemahkan keberlanjutan gerakan digital akar rumput (Fathurokhmah, 2023; Aminudin, 2023).

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital di sebagian besar segmen masyarakat Indonesia menyebabkan narasi-narasi emansipatoris sering kalah dalam persaingan visibilitas dengan konten sensasional, hiburan, atau propaganda visual yang dikemas secara menarik. Konten mendalam dan argumentatif kalah viral dibandingkan meme, clickbait, dan video pendek bernuansa emosional. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya medan ideologis, tetapi juga pasar perhatian (*attention economy*) yang sangat kompetitif (Latif et al., 2022; Ratnaningsih, 2019).

Meskipun demikian, keberadaan konten-konten reflektif dan aktivisme digital tetap memiliki pengaruh signifikan, terutama dalam membentuk opini kalangan muda yang lebih terbuka terhadap isu-isu keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Sebuah studi oleh Ahmad & Sheikh (2020) menegaskan bahwa keterlibatan pemuda dalam politik meningkat seiring dengan paparan mereka terhadap konten kritis di media sosial. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana ekspresi, tetapi juga alat edukasi yang efektif bila dimanfaatkan secara strategis.

Lebih jauh, gerakan sosial berbasis digital juga memperlihatkan bentuk baru civic engagement yang memadukan strategi online dan offline. Aksi massa yang berangkat dari viralitas tagar atau narasi digital sering berujung pada aksi demonstrasi atau petisi publik. Hal ini membuktikan bahwa ruang digital memiliki kapasitas untuk menjadi pemicu perubahan sosial, bukan hanya ruang simbolik (Ardini, 2015; Alfazri & Meiranti, 2024).

Sebagai ruang emansipasi, media sosial juga memberikan tempat bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan dalam diskursus publik. Kaum difabel, komunitas LGBTQ+, masyarakat adat, dan minoritas agama semakin terdengar suaranya di ruang digital berkat kampanye edukatif yang dibangun dengan pendekatan personal dan naratif. Ini sejalan dengan pemikiran Habermas mengenai ruang publik sebagai arena inklusif untuk dialog rasional dan setara.

Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada tantangan struktural dan teknologis, ruang emansipatif di media sosial tetap menjadi tempat penting bagi pendidikan politik non-formal, pembentukan identitas kolektif, dan mobilisasi aksi sosial. Tugas kita selanjutnya adalah memperkuat kapasitas warga untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkritisi konten secara sadar serta membangun solidaritas digital lintas komunitas agar potensi emansipatif ini tidak padam oleh dominasi simbolik.

Peran Edukatif Media Sosial dalam Demokrasi Digital

Media sosial dewasa ini tidak hanya berfungsi sebagai wahana komunikasi interpersonal atau alat promosi politik, tetapi juga memegang peran penting sebagai instrumen edukatif non-formal dalam konteks demokrasi digital. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter telah menjadi saluran pembelajaran yang sangat fleksibel dan menjangkau jutaan pengguna lintas usia dan kelas sosial. Melalui konten berbasis narasi visual, storytelling, infografis, dan video pendek, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai isu-isu krusial seperti hak politik, kesenjangan ekonomi, ketimpangan representasi gender, dan kebijakan publik secara lebih mudah dicerna (Ansori et al., 2021; Ahmad & Sheikh, 2020).

Namun, meskipun terdapat peluang besar, efektivitas peran edukatif media sosial masih menghadapi tantangan serius. Salah satu persoalan utama adalah dangkalnya pendekatan pedagogis dalam mayoritas konten digital yang bersifat edukatif. Sebagian besar pendidikan digital hanya menekankan pada aspek teknis seperti *fact-checking*, etika berbagi, dan perlindungan data pribadi, tanpa membongkar struktur ideologis yang memproduksi ketimpangan informasi dan kekuasaan simbolik. Hal ini menyebabkan pendidikan digital bersifat prosedural, bukan transformatif (Fathurokhmah, 2023; Khaeroni, 2022).

Untuk itu, penting mengintegrasikan pendekatan pedagogis kritis sebagaimana ditawarkan oleh Paulo Freire, yang mengedepankan konsep *conscientization* atau kesadaran kritis sebagai prasyarat emansipasi. Dalam konteks media sosial, pendekatan ini berarti mendorong pengguna tidak hanya memahami *apa* informasi yang beredar, tetapi *siapa* yang memproduksi informasi tersebut, *mengapa* ia diproduksi, dan *untuk kepentingan siapa*. Proses pendidikan yang demikian bersifat dialogis dan reflektif, yang pada gilirannya mampu menciptakan warga digital yang aktif, sadar ideologi, dan partisipatif dalam praktik demokrasi (Gibson, 1999; Imron, 2020).

Dalam praktiknya, pendekatan ini membutuhkan intervensi sistematis dari berbagai aktor, terutama institusi pendidikan formal, organisasi masyarakat sipil, dan bahkan negara. Sayangnya, peran institusi pendidikan masih cenderung konservatif dalam merespons dinamika media baru, sementara banyak organisasi masyarakat sipil kekurangan dukungan teknis dan infrastruktur untuk menjangkau khalayak yang lebih luas secara digital (Latif et al., 2022; Mudjiyanto et al., 2023).

Kehadiran aktor negara, terutama dalam hal regulasi konten dan penyusunan kurikulum literasi digital, juga sangat menentukan arah pendidikan publik dalam ruang digital. Namun, peran negara haruslah bersifat fasilitatif, bukan represif. Program literasi digital yang bersifat

top-down, tanpa melibatkan masyarakat sipil dan komunitas pengguna aktif, justru berpotensi mereproduksi hegemoni melalui regulasi yang membungkam, bukan mencerdaskan (Basumatary, 2020; Alfazri & Meiranti, 2024).

Kolaborasi multipihak menjadi solusi strategis untuk membangun ekosistem informasi digital yang sehat dan transformatif. Dalam kerangka ini, institusi pendidikan perlu memperluas mandatnya dengan mengintegrasikan literasi digital kritis ke dalam kurikulum; platform digital bertanggung jawab menghadirkan algoritma yang adil dan transparan; sementara organisasi sipil dapat memainkan peran sebagai fasilitator literasi komunitas berbasis kebutuhan lokal (Kurniawan, 2025; Nugroho, 2025).

Bentuk konten edukatif pun perlu bertransformasi dari sekadar informatif menjadi partisipatif dan interaktif. Misalnya, penggunaan podcast, *live discussion*, dan *video explainers* dengan narasi kuat berbasis pengalaman masyarakat akar rumput terbukti lebih mampu menyentuh audiens dan memantik diskusi publik yang lebih reflektif. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi membangun ruang dialogis yang memperluas imajinasi politik masyarakat (Saraswati, 2018; Ardini, 2015).

Dengan demikian, peran edukatif media sosial dalam demokrasi digital tidak bisa dilepaskan dari pertarungan ideologis dan struktural. Ia bukan hanya soal “mengajarkan cara menggunakan media secara bijak”, tetapi menyangkut *apa* yang diajarkan, *bagaimana* ia diajarkan, dan *untuk tujuan siapa* proses itu berlangsung. Literasi digital kritis yang bersifat dialogis dan emansipatoris menjadi kebutuhan mendesak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap informasi digital dan ancaman post-truth yang semakin meluas (Fathurokhmah, 2023; Kurniawan, 2025).

Ketegangan antara Kontrol dan Kebebasan

Temuan menarik muncul dari analisis kasus kampanye digital mahasiswa dan aktivis dalam Pemilu 2024. Mahasiswa dari berbagai universitas, terutama di Yogyakarta dan Bandung, menggunakan media sosial untuk menolak polarisasi politik dan mendesak isu substantif seperti keadilan sosial dan reformasi agraria. Namun, tagar dan konten mereka sering dibayang-bayangi oleh narasi elite yang lebih mudah diterima publik berkat dukungan buzzer dan selebgram politik (Ahmad & Sheikh, 2020).

Kasus Reformasi Dikorupsi yang muncul kembali pada 2023 menjadi contoh nyata ketegangan antara kontrol dan kebebasan. Meskipun kampanye digital itu menyuarakan tuntutan konkret dan memperoleh resonansi luas, beberapa konten mengalami pembatasan

distribusi, dan akun penggiatnya mendapat ancaman digital. Ini mencerminkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital masih bersyarat.

Dampak dari dinamika ini terhadap literasi politik publik cukup signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat digital Indonesia tidak sepenuhnya apatis, tetapi sering kali bingung dalam memilah informasi yang kredibel. Literasi politik menjadi rentan karena media sosial lebih mendorong konsumsi reaktif ketimbang refleksi kritis. Hal ini sejalan dengan temuan Latif et al. (2022) bahwa konten dengan format meme atau hiburan lebih mudah menyebar daripada konten berbasis argumen.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa media sosial adalah medan kontestasi wacana antara hegemoni dan emansipasi. Di satu sisi, teori hegemoni Gramsci terbukti relevan dalam menjelaskan bagaimana narasi dominan dikonstruksi oleh kekuatan politik melalui media digital. Di sisi lain, pendekatan Paulo Freire dan Habermas menemukan pantulannya dalam praktik-praktik komunitas yang mencoba membangun ruang publik yang lebih deliberatif dan membebaskan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2025) yang menyoroti peran budaya populer dalam menyuarakan kritik sosial, serta Kurniawan (2025) yang mengidentifikasi ancaman post-truth dalam kampanye politik digital. Namun berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus pada konten atau dampak, studi ini lebih menekankan strategi diskursif dan praksis komunikatif sebagai elemen utama dalam pertarungan hegemoni.

Perbedaan temuan ini dapat dijelaskan oleh pendekatan netnografi dan CDA yang memberikan kedalaman dalam menggali makna dan strategi narasi. Penggunaan teknik observasi langsung terhadap praktik diskursif membuat penelitian ini mampu mengungkap dinamika kekuasaan secara kontekstual dan organik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial dalam konteks demokrasi digital Indonesia berfungsi sebagai medan tarik-menarik antara kekuatan hegemonik dan potensi emansipatoris. Temuan utama menunjukkan bahwa elite politik, buzzer, dan platform digital memainkan peran signifikan dalam mengonstruksi dan mendistribusikan narasi dominan yang menguntungkan status quo. Dengan memanfaatkan algoritma dan konten populis, aktor-aktor ini membentuk opini publik melalui kontrol representasi dan pengaturan visibilitas informasi, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori hegemoni Gramsci.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya ruang-ruang resistensi yang dimanfaatkan oleh komunitas digital, content creator independen, dan aktivis mahasiswa untuk menyuarakan narasi tandingan. Mereka menggunakan strategi diskursif, konten edukatif, dan budaya populer sebagai media kritik terhadap kekuasaan, mendekati gagasan Paulo Freire tentang pendidikan pembebasan dan Jürgen Habermas mengenai ruang publik deliberatif. Namun, ruang ini masih sangat rentan terhadap represi simbolik, marginalisasi algoritmik, dan serangan balik digital, yang membuatnya lebih bersifat temporer dan simbolik daripada struktural.

Secara keseluruhan, hipotesis bahwa media sosial adalah arena kontestasi antara hegemoni dan emansipasi didukung oleh hasil penelitian. Namun, kecenderungan kekuatan hegemonik untuk mendominasi melalui mekanisme teknologi dan ekonomi masih lebih kuat dibandingkan kekuatan emansipatif dari warga digital, khususnya karena keterbatasan literasi politik dan algoritma yang tidak netral.

Implikasi praktis dari temuan ini menekankan pentingnya membangun kebijakan literasi digital yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga kritis. Negara, institusi pendidikan, dan platform media sosial perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih adil, terbuka, dan edukatif. Literasi digital yang transformatif harus mengajarkan publik untuk membaca wacana, memahami struktur kekuasaan, serta mengembangkan kesadaran kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi dan produksi.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah ruang lingkup platform yang terbatas dan periode observasi yang tidak longitudinal. Selain itu, karakteristik pengguna media sosial yang sangat beragam membuat generalisasi temuan harus dilakukan dengan kehati-hatian. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas analisis ke platform lain seperti YouTube dan Telegram, serta menggunakan pendekatan kombinatorik (mixed-method) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika kekuasaan dalam ruang digital.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, D. K., & Sheikh, D. K. S. (2020). Social Media and Youth Participatory Politics: A Study of University Students. *South Asian Studies*, 28(2), Article 2. <http://111.68.103.26/journals/index.php/IJSAS/article/view/2892>
- Alfazri, M., & Meiranti, M. (2024). Rekonstruksi Pendekatan Kritik Budaya dalam Komunikasi: Dari Media Konvensional hingga Revolusi Digital. *INTERCODE*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.36269/ire.v4i2.2960>

- Aminudin, A. (2023). Media Sosial dan Wacana penundaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Norman Fairclough. *JURNAL LENSEA MUTIARA KOMUNIKASI*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i2.4407>
- Ansori, M., Afandi, A., Fitriyah, R. D., Safarina, R., & Farisia, H. (2021). Pendekatan-pendekatan dalam University-Community Engagement. UIN Sunan Ampel Press.
- Ardini, N. W. (2015). Industrialisasi Musik Pop Bali: Ideologi, Kepentingan, Dan Praktiknya. *Segara Widya : Jurnal Penelitian Seni*, 3. <https://doi.org/10.31091/sw.v3i0.172>
- Basumatary, J. (2020). Michel Foucault on Regenerative Relatedness of Power/Knowledge and Truth. *Journal of Indian Council of Philosophical Research*, 37(3), 323–341. <https://doi.org/10.1007/s40961-020-00224-4>
- Fathurokhmah, F. (2023). WACANA KRITIS KLAIM KEBENARAN ISU KEAGAMAAN MASA KRISIS DI MEDIA SOSIAL - Damera Press. Damera Press.
- Gibson, R. (1999). Paulo Freire and Pedagogy for Social Justice. *Theory & Research in Social Education*, 27(2), 129–159. <https://doi.org/10.1080/00933104.1999.10505876>
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research. Literasi Nusantara.
- Imron, A. (2020). Mengkonstruksi Kesadaran Kritis dalam Pendidikan di Era New Normal: Telaah Perspektif Pedagogi Kritis (hlm. 251–261). IAINPAREPARE Nusantara Press. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1707>
- Juwita, R., Marendah, E., Ardiansyah, S., Wahidah, A., Saputra, N., Jayadi, S., Masri, Tanipu, F., Putra, A. P., Rema, F., Susilawati, D., Subandi, Y., Yorman, & Athahirah, A. (2023). Teori-Teori Sosial YPMZ.
- Khaeroni, C. (2022). Disrupsi digital, humanisasi dan masa depan pendidikan (studi sintesa pemikiran paulo freire dan muhammad iqbal dalam menghadapi pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0) [doctoralThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74930>
- Kurniawan, A. R. (2025). The Threat of Forming a Post-Truth Scenario Through Political Propaganda by Social Media Users in the 2024 General Election. *Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.70710/sitj.v2i1.32>
- Latif, S. A., Fernando, H., & Larasati, Y. G. (2022). Simbol dan Makna: Penyebaran Meme Narkoba dalam Instagram. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss1.art2>
- Mudjiyanto, B., Lusianawati, H., & Launa, L. (2023). Dinamika Studi Media: Dari Agenda Setting, Agen Konstruksi, Sarana Representasi, Hingga Alat Konsensus Sosial. *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, 5(1), Article 1. <https://www.ojs.ubk.ac.id/index.php/oratio/article/view/428>
- Nugroho, B. H. (2025). Sinisme Politik di Media Sosial: Analisis Kritik Sosial Lagu Viral “Bayar Bayar Bayar” Band Sukatani. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(3), Article 3.

- Ratnaningsih, D. (2019). Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori dan Implementasi. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Raynauld, V., & Lalancette, M. (2023). Chapter 13: Social media, visuals, and politics: a look at politicians' digital visual habitus on Instagram. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781800376939/book-part-9781800376939-21.xml>
- Saraswati, M. S. (2018). Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v3i1.124>
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Surdiasis, F., & Eriyanto, E. (2018). Narrative of politics in the era of social media: A multimodal analysis of president Joko Widodo's video blog. E3S Web of Conferences, 74, 10012. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187410012>
- Thompson, A. (2024, Oktober 23). Digital 2024 October Global Statshot Report. We Are Social Indonesia. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/10/digital-2024-october-global-statshot-report/>
- Videska, A. V. V. (2023). Komunikasi Politik Pks Dalam Meraih Suara Milenial Pada Instagram @Pksmudacom [bachelorThesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74021>